

ABSTRAK

MUHAMMAD NOVALDI, NPM: 2022422, Judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN TERHADAP KONDISI JALAN RUSAK DI DESA TELUK BARU KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**. Dibawah Bimbingan Ibu Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP. Sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi. Sebagai Dosen Pembimbing II.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bertugas merencanakan, membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur jalan serta jembatan guna mendukung konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan kabupaten yang rusak di Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kerusakan jalan yang menghambat mobilitas masyarakat, belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pada Bina Marga, serta lambatnya penanganan jalan yang telah mengalami kerusakan selama kurang lebih delapan tahun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan informan secara *purposive sampling* berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan Teknik Kondensasi Data, Data Penyajian (*Display Data*), dan *Conclusion Drawing/verification*. Uji kredibilitas data pada penelitian ini Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Analisis Kasus Negatif, Menggunakan Bahan Referensi dan Mengadakan Member check.

Hasil penelitian menunjukkan dapat diambil kesimpulan cukup baik. Pada sub variabel komunikasi, indikator yang cukup baik yaitu transmisi dan koordinasi. Pada sub variabel sumber daya, indikator yang cukup baik yaitu Staf berfokus pada kompetensi dalam perencanaan, sedangkan indikator fasilitas baik dan sumber daya finansial yaitu Anggaran yang terbatas. Pada sub variabel disposisi, indikator yang cukup baik yaitu komitmen PUPR dan Bina Marga, responsivitas yaitu respon pemerintah dalam memperbaiki jalan yang rusak, dan indikator tanggung jawab pemerintah. Pada sub variabel struktur birokrasi, indikator yang cukup baik yaitu fragmentasi tugas antar tingkat dan SOP. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah anggaran pembangunan jalan yang terbatas sehingga pembangunan lambat terealisasi, Bina Marga kekurangan teknisi ahli yang membuat pembangunan kurang efektif, dan kurangnya penyampaian informasi sehingga terdapat distorsi informasi. Adapun faktor pendukung yaitu adanya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022, fasilitas yang menunjang pembangunan perbaikan jalan, dan dokumentasi kondisi jalan.

Guna meningkatkan keberhasilan implementasi oleh Dinas PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap jalan yang rusak, Bina Marga memerlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas sumber daya, peningkatan komitmen

pelaksana, serta penyempurnaan mekanisme birokrasi agar penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan dan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan Angkutan Jalan.



ABSTRACT

MUHAMMAD NOVALDI, NPM: 2022422. Title: **"IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 2 OF 2022 CONCERNING ROADS ON THE CONDITION OF DAMAGED ROADS IN TELUK BARU VILLAGE, AMUNTAI SELATAN DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY."** Under the guidance of **Mrs. Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP.**, as Supervisor I, and **Mr. Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi.**, as Supervisor II.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), through the Directorate General of Bina Marga, is responsible for planning, constructing, managing, and maintaining road and bridge infrastructure to support connectivity and improve public welfare. This study aims to analyze the implementation of Law Number 2 of 2022 concerning Roads in relation to the condition of damaged regency roads in Teluk Baru Village, South Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors influencing its implementation. This research was motivated by the persistent deterioration of road conditions that hinder community mobility, the suboptimal competence of human resources within the Directorate of Highways (Bina Marga), and the slow response to road damage that had remained unresolved for approximately eight years.

This study employed a qualitative approach with a descriptive qualitative research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants were selected using purposive sampling, resulting in a total of 14 participants. The collected data were analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The credibility of the data was ensured through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, negative case analysis, the use of reference materials, and member checking.

The research findings lead to generally positive conclusions. Regarding the communication sub-variable, transmission and coordination emerged as strong indicators. In the resources sub-variable, staff competence in planning was a positive indicator, while facilities were rated well; however, financial resources were constrained by a limited budget. For the disposition sub-variable, positive indicators included the commitment of PUPR and Bina Marga, government responsiveness in repairing damaged roads, and government accountability. Regarding the bureaucratic structure sub-variable, task fragmentation across levels and Standard Operating Procedures (SOPs) were identified as positive indicators. Inhibiting factors for policy implementation included a limited road construction budget—resulting in slow project realization—a shortage of expert technicians at Bina Marga that reduced construction effectiveness, and poor information dissemination leading to information distortion. Conversely, supporting factors included the existence of Republic of Indonesia Law Number 2 of 2022, facilities supporting road repair and construction, and documentation of road conditions.

To improve the success of road repair implementation by the Directorate General of Highways (Bina Marga) under the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Directorate requires enhanced coordination, strengthened human resource capacity, greater commitment from implementers, and refined bureaucratic mechanisms; this is to ensure that road management operations comply with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022

concerning Roads and the Hulu Sungai Utara Regent Regulation Number 72 of 2018 concerning the Traffic Management System for Road Signs and Road Transport.

